

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membicarakan tentang pendidikan memang tidak ada habisnya. Tidak heran bila kesadaran masyarakat awam tentang pentingnya pendidikan berangsur-angsur menunjukkan peningkatan. Dunia pendidikan tidak hanya melibatkan peserta didik saja, namun juga melibatkan guru sebagai pendidik serta interaksi antara keduanya. Interaksi tersebut merupakan wadah untuk mendapatkan pembelajaran dan pengembangan pengetahuan juga keterampilan. Interaksi antar keduanya dilakukan dalam konteks tertentu dalam suatu proses pembelajaran.

Peran serta dan tanggung jawab guru pada dunia pendidikan sangat penting. Selain berperan menransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Definisi guru diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. (<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/guru>, diakses 12 February 2013)

Seperti yang diungkapkan di atas, guru merupakan figur yang memiliki peran sebagai perancang, pendidik, penggerak, evaluator, dan motivator. Upaya guru dalam mendidik, membimbing, mengajar serta melatih siswa didik juga bukanlah

hal yang mudah, karena dibalik profesi itu dibutuhkan keseriusan, pengalaman, serta sikap profesional. Dengan demikian, profesi guru merupakan suatu pilihan hidup seseorang. Tidaklah heran jika untuk dapat menjadi seorang guru dibutuhkan kemampuan dan kompetensi, kesediaan berkorban, serta sabar dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Di Indonesia terdapat dua status guru, yaitu guru tetap dan guru honorer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian pemerintah perlu mengatur jumlah pengangkatan dan pendapatan tenaga honorer agar tidak membengkakkan APBN maupun APBD. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dan secara jelas tertulis dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 1 bahwa pengangkatan tenaga honorer yang pertama diprioritaskan adalah guru.

Dalam bidang pendidikan, PP Nomor 48 Tahun 2005 merupakan kondisi yang dilematis. Revisi terhadap PP Nomor 48 Tahun 2005 mengenai masa kerja guru honorer minimal telah bekerja selama 20 tahun diganti dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 menjadi masa bekerja minimal 1 tahun. Selanjutnya dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 juga merevisi seleksi guru honorer hanya membutuhkan seleksi administrasi. Namun dalam pelaksanaannya, pengangkatan guru honorer masih tetap hanya diperbolehkan berdasarkan Surat Keputusan dari kepala sekolah yang menerima guru honorer tersebut. Surat Keputusan tersebut berisi mengenai penilaian kepala sekolah, apakah guru honorer sudah layak atau belum memperoleh pengangkatan. Dengan demikian payung hukum dan pelaksanaan dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang tidak jelas ini harus diperhatikan karena seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan tenaga honorer seperti guru tentu juga bertambah.

(<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/128.pdf>, diakses 12 February 2013)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua AGHI (Asosiasi Guru Honor Indonesia) diperoleh gambaran mengenai peraturan di atas yang juga berlaku untuk para guru honorer di Bandung, maka para guru honorer membentuk suatu wadah yang dinamakan AGHI. Pada tahun 2013 anggota AGHI di Bandung berjumlah 9.740 orang, 6.200 orang diantaranya telah bekerja di sekolah-sekolah negeri (4.000 di SD, 1.200 di SMP dan 1.000 di SMA serta SMK), 2.340 bekerja di sekolah swasta, dan 1.200 bekerja sebagai honorer TU. Anggota AGHI Bandung terdiri atas para guru honorer di TK, SD, SMP dan SMA di Kota

Bandung. Latar belakang dibentuknya AGHI dipicu oleh kurangnya persatuan dan kesatuan guru honorer dalam memperoleh informasi mengenai peraturan, jadwal, dan proses yang harus dilalui oleh guru honorer saat ingin memroses status sebagai PNS. AGHI dipandang dapat mempermudah tersebarnya informasi yang diperlukan kepada guru-guru honorer. Visi dan misi AGHI ini adalah memererat silaturahmi antar semua guru honorer di Bandung dengan cita-cita utama yaitu diangkatnya guru-guru honorer menjadi PNS.

Untuk mendapatkan status sebagai PNS, guru honorer harus menjalani serangkaian tahap sebagai prasyarat dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebelum menjadi PNS, guru honorer yang dianggap telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sesuai peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2010 dapat mengajukan diri untuk mengikuti tes CPNS. Bagi yang lulus tes CPNS, berstatus CPNS. Setelah berstatus CPNS, tahap selanjutnya para guru yang berstatus CPNS harus memenuhi beberapa persyaratan dan menjalani masa percobaan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Persyaratan yang harus dijalani ditentukan oleh dinas pendidikan kota bersangkutan yang kemudian disampaikan pada sekolah-sekolah untuk memberikan tugas-tugas kepada guru CPNS yang dipekerjakan di sekolah masing-masing. Jika berhasil memenuhi seluruh persyaratan dan mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik selama satu tahun, maka kepala sekolah akan mengajukan kepada dinas pendidikan setempat untuk pengangkatan sebagai PNS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua AGHI diperoleh juga gambaran guru honorer menghadapi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Dimulai dari status sebagai guru honorer tidak menjanjikan secara finansial, karena gaji yang sangat jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Selain itu, gaji juga belum tentu dibayarkan setiap bulan sehingga memaksa guru honorer bekerja sampingan seperti berdagang, memberi les privat, menjadi tukang ojek. Para guru honorer sama sekali tidak memperoleh tunjangan-tunjangan yang disediakan oleh pemerintah, sebagaimana yang diterima oleh guru PNS.

Sebagai seorang pendidik, guru honorer yang dipekerjakan di sekolah memiliki beban tugas dan tanggung jawab tidak ubahnya seperti beban dan tanggung jawab tugas guru PNS. Para guru honorer mengajar di kelas sejak pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang, tidak jarang masih harus mengerjakan tugas di luar jam kerja. Para guru honorer juga seringkali diberi beban tugas lain di luar beban mengajar rutinnnya, yaitu menggantikan guru tetap yang berhalangan mengajar, atau memperoleh beban tugas administrasi yang seharusnya dikerjakan oleh tata usaha sekolah. Beban tugas tambahan ini, pada dasarnya, tidak dapat ditolak karena guru honorer harus bersedia memberikan kontribusi positif bagi operasionalisasi sekolah dan menghindari sanksi dari pihak kepala sekolah, misalnya secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan guru honorer bersangkutan.

Fakta di lapangan menunjukkan, guru honorer bekerja di bawah bayang-bayang kecemasan terkait ketidakjelasannya tentang kapan akan diangkat menjadi CPNS. Fakta tersebut didukung oleh pernyataan dari Agus Siswanto sebagai Ketua Fraksi PDIP Grobongan yang menyatakan bahwa guru wiyata bhakti bekerja tanpa didasari oleh aturan yang jelas dan memperoleh pendapatan yang minim (Anonim, 27 Oktober 2010). Senada dengan itu, Sulistyono selaku Ketua Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan, guru honorer belum memiliki jaminan dan ketenangan kerja. Selama ini banyak guru honorer yang diberhentikan secara tiba-tiba dan sepihak oleh pihak sekolah, penyebabnya karena adanya guru baru yang direkrut pihak sekolah sehingga guru honorer menjadi pihak yang paling cepat disisihkan (Aulia, 3 January 2010). (ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/414/414, diakses 12 February 2013)

Untuk memperoleh gambaran fakta yang aktual, peneliti melakukan wawancara kepada anggota AGHI. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dalam pengabdianya sebagai pengajar dan tergabungnya guru honorer dalam AGHI Bandung, harapan utamanya adalah untuk memperoleh pengakuan dari pihak pemerintah berupa pengangkatan sebagai PNS. Tumbuhnya harapan serupa itu sepenuhnya bisa dimaklumi, mengingat status sebagai guru PNS memiliki masa depan yang lebih menjanjikan selain dibarengi dengan kepastian penghasilan di setiap bulannya.

Dari hasil *survey awal* dengan cara FGD (*Focussed Group Discussion*) yang melibatkan 10 orang guru honorer anggota AGHI, diperoleh pelbagai gambaran

tentang keadaan guru honorer. Diawali dengan menanyakan “Apakah alasan yang melatarbelakangi keinginan menjadi guru” jawaban yang diperoleh adalah “karena ingin melakukan pengabdian dalam bentuk pengamalan ilmu kepada peserta didik sesuai dengan UUD’45 dan Pancasila”, “karena panggilan hati”, “desakan orangtua”, “berlatarbelakang keluarga yang kebanyakan berprofesi guru”, “memiliki ijazah ilmu kependidikan dan karenanya merasa punya kompetensi untuk menjadi guru”, “mengisi waktu luang (bagi guru wanita)”, serta “bertumpu pada PP 48/2003 dan PP 43/2007 yang menyatakan semua guru bantu atau guru honorer akan diangkat menjadi CPNS”.

Predikat guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan karenanya memandang profesi guru sebagai sesuatu yang mulia, adalah pandangan yang masih melekat kuat pada diri guru-guru honorer tersebut. Selain itu, ada kecenderungan beberapa diantaranya ingin bertahan menjadi guru sekalipun secara finansial kurang menjanjikan. Penyebabnya karena faktor usia yang terbilang sudah tidak muda lagi.

Diantara guru honorer perempuan peserta FGD ini muncul pula pengakuan bahwa profesi guru tidak memberinya kelebihan secara finansial, juga tidak menjanjikan dan tidak memberi kecukupan kebutuhan untuk menyekolahkan keempat orang anaknya. Kebersikukuhan dirinya untuk bertahan ternyata didorong oleh keinginan untuk mengabdikan yang dilandasi keikhlasan, dengan demikian berkahpun datang dari pekerjaan sampingannya yaitu “*home industry*” konfeksi. Guru wanita lain mengungkapkan alasan dirinya menjadi guru adalah untuk

mengisi kesibukan sehari-hari, karena kebutuhan keluarga sudah tercukupi oleh penghasilan suami. Khusus untuk guru ini, dirinya tidak terlalu mengkhawatirkan masa depannya karena profesi guru buatnya hanyalah sebentar pengabdian dan wujud saling mendukung dengan sesama guru honorer.

Pertanyaan tentang perasaan yang dihayati sehubungan dengan status sebagai guru honorer, secara umum diperoleh jawaban bahwa para guru honorer merasa diperlakukan tidak adil dan cenderung terabaikan oleh pihak sekolah maupun oleh peraturan pemerintah. Padahal dalam menunaikan kewajiban sebagai pengajar dirinya memperlihatkan loyalitas yang bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan guru PNS. Para guru honorer juga, terkadang, merasa diperlakukan tidak adil karena masih sering terjadi ada guru yang bisa langsung diangkat sebagai PNS padahal terbilang baru lulus, sementara banyak guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari lima tahun tetapi statusnya tidak kunjung berubah. Kenyataan ini dilatarbelakangi oleh masalah pendidikan, yaitu para guru muda (yang belum lama lulus) memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini. Guru honorer yang telah lama lulus menyatakan faktor usia membuat dirinya sulit untuk menerima hal baru, selain diperlukan biaya yang harus ditanggung sendiri apabila ingin memperbaharui pengetahuan di bidang kependidikan. Agaknya, keadaan itulah yang menyebabkan para guru honorer bekerja dengan perasaan cemas yang dilandasi oleh ketidakjelasan kapan akan diangkat menjadi CPNS.

Selain hal-hal negatif di atas, terdapat hal-hal positif yang dirasakan paraguru honorer. Adanya perasaan bangga karena memiliki kesempatan menjalankan tugas mulia sebagai pendidik, merasa berharga di mata masyarakat karena profesi guru masih dipandang sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa dengan tugas mulia. Dalam kenyataannya, masyarakat tidak membedakan status guru honorer dengan guru tetap. Keduanya sama-sama diposisikan sebagai figur terhormat dan berharga. Sebagian guru honorer beranggapan menjalankan tugas sebagai guru honorer tidak ubahnya seperti amal ibadah.

Para guru honorer juga merasa puas secara batiniah karena melalui profesinya itu dirinya dapat memberikan ilmu kepada peserta didik, meski disisi lain merasa tidak kunjung memperoleh penghargaan yang sepadan. Statusnya sebagai guru honorer yang tidak kunjung memperoleh pengangkatan membuatnya harus menunggu tanpa batas waktu untuk berubahnya kesejahteraan secara menyeluruh.

Guru-guru honorer yang tergabung di AGHI memiliki rentang usia antara 21 hingga 52 tahun. Ini tergolong sebagai usia produktif. Kenyataannya bahwa guru-guru honorer tersebut belum memiliki kepastian tentang pekerjaannya karena terhambat oleh prosedur pengangkatan sebagai CPNS, merupakan persoalan yang bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar kejelasan orientasi masa depan di bidang pekerjaan. Misalnya, “Apakah pilihan pekerjaan sebagai guru merupakan pilihan yang tepat?”; “Akankah profesi sebagai guru ini harus tetap dipilih dan dijalani sekalipun tidak memberikan kepastian tentang kemungkinan diangkat sebagai CPNS?”; “Apakah status CPNS merupakan satu-satunya pilihan

pekerjaan yang menjanjikan masa depan?"; "Sampai kapan harus bertahan sebagai guru honorer?".Pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya, berfokus memertanyakan seberapa besar kejelasan tentang orientasi masa depan di bidang pekerjaan pada guru-guru honorer ini.

Orientasi masa depan didefinisikan sebagai cara seseorang memandang masa depannya yang mencakup motivasi untuk mencapai tujuan, perencanaan, dan evaluasi atas strategi pencapaian tujuan (Nurmi, 1989).Seorang guru honorer yang pada awalnya memiliki motivasi yang kuat untuk berkiprah sebagai seorang guru karena dilandasi oleh kompetensi, dukungan keluarga, atau status simbol tertentu akan menyusun langkah-langkah perencanaan untuk memastikan pilihan karirnya sehingga orientasinya untuk menekuni dan memilih pekerjaan sebagai guru akan terarah pada suatu *goal* yang jelas. Setiap langkah dari perencanaan yang telah disusun itu akan memunculkan pelbagai evaluasi-evaluasi sederhana atau kompleks yang berintikan memertanyakan seberapa akurat langkah perencanaan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi itu akan bermuara kembali pada motivasi, yang dalam hal ini akan menguat atau melemah, sehingga akan menuntun orang bersangkutan kembali menyusun langkah-langkah perencanaan, dan selanjutnya akan mengalami evaluasi kembali. Ini adalah siklus yang dimaksud, dan orientasi masa depan memang berlangsung dalam siklus yang akan berulang-ulang secara sinambung.

Ketiga aspek dalam orientasi masa depan bidang pekerjaan yang berproses secara siklik itu akan berujung pada jelas atau tidak jelasnya orientasi yang

dimaksud. Akan halnya guru yang telah lima tahun bergelut menekuni pekerjaan sebagai guru honorer yang tidak kunjung diangkat status kepegawaiannya, juga akan mengalami keadaan yang sama. Pada akhirnya akan memertanyakan betulkah pilihannya untuk menekuni pekerjaan sebagai guru. Kemungkinannya adalah, akan melanjutkan pilihannya sebagai guru atau berpikir untuk alih profesi.

Dampak guru honorer yang tidak memperoleh masa depan yang baik dan jelas tersebut juga diungkapkan oleh Ratna Supradewi dan Rohmatun yang meneliti “Hubungan antara stres terhadap masa depan dan perilaku marah pada guru honorer di kota Kendal”. Dalam penelitian tersebut dituliskan “Berdasar wawancara dari beberapa guru honorer, diperoleh informasi bahwa salah satu motivasi responden menjadi guru honorer adalah untuk menjadi PNS (guru tetap), sebagai jaminan masa depan, dan ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Namun, karena guru honorer tidak mendapatkan kepastian tersebut, maka guru honorer menganggap ketidakpastian itu sebagai ancaman bagi masa depannya, sehingga selanjutnya akan mengakibatkan stres terhadap masa depan.”

(<http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210700007/7527ratnarohmatunstres.pdf>, diakses 4 April 2013)

Gambaran yang dimiliki seseorang mengenai masa depan dalam bidang pekerjaan merupakan upaya antisipatif terhadap harapan masa depan. Diharapkan dengan adanya orientasi masa depan yang jelas, para guru honorer dapat mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan dan diharapkan dapat

mengatasinya dengan baik dibandingkan guru honorer yang memunyai orientasi masa depan tidak jelas.

Dengan karakteristik guru honorer yang telah mengabdikan lebih dari lima tahun dan tidak kunjung diangkat menjadi PNS, tidak ada kepastian penghasilan per bulan, kebutuhan finansial yang tidak menjanjikan membuat guru honorer tidak memperoleh masa depan yang baik dan jelas sebagai guru, maka melalui penelitian ini ingin diketahui seperti apakah gambaran orientasi masa depan bidang pekerjaan guru honorer yang tergabung dalam Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya lima tahun.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui bagaimanakah gambaran orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorer di Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk memperoleh gambaran mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorer di Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa kuat *motivation* (motivasi), seberapa terarah *planning* (perencanaan) dan seberapa akurat *evaluation* (evaluasi) guru

honorar Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- Memberikan informasi pada bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan, mengenai gambaran orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorar di Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung.
- Penelitian ini akan menjadi khasanah untuk memperkaya wawasan peneliti lain yang tertarik meneliti mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Memberikan informasi mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan kepada guru honorar di Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung agar dapat mengupayakan antisipasi terhadap harapan masa depannya, misalnya apabila jelas guru honorar tersebut bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, menambah wawasannya agar bisa lulus tes CPNS dan apabila tidak jelas maka guru honorar tersebut bisa menjalani konsultasi pekerjaan atau pindah pekerjaan lain.
- Memberikan informasi kepada ketua AGHI kota Bandung mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorar yang sudah memiliki orientasi masa depan jelas untuk menjadi pertimbangan dalam upaya memberi dukungan dan pengarahan kepada anggota AGHI missal

mengadakan kegiatan seminar untuk menambah ilmu guru honorer kota Bandung sehingga dapat membantu untuk mendapatkan statusnya sebagai PNS.

- Memberikan informasi kepada ketua AGHI kota Bandung mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorer yang belum memiliki orientasi masa depan jelas untuk menjadi pertimbangan dalam upaya memberi dukungan, konseling pekerjaan, atau menyusun program yang bermanfaat untuk mengarahkan anggota AGHI kota Bandung tersebut sehingga dapat membantu untuk mendapatkan orientasi masa depan yang jelas dalam bidang pekerjaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap manusia akan menjalani serangkaian tahap-tahap perkembangan di sepanjang rentang hidup, dimulai dari masa konsepsi hingga meninggal. Semua tahap perkembangan tersebut memiliki tugas tersendiri, seperti kajian yang akan diteliti kali ini yaitu tahap perkembangan dewasa awal dan dewasa madya. Perkembangan dewasa awal memiliki rentang usia antara 20-40 tahun sedangkan dewasa madya memiliki rentang usia 40-60 tahun (Santrock, 2002). Salah satu ciri tugas perkembangan dewasa awal yaitu memasuki dunia kerja dan karir. Artinya dewasa awal harus memiliki kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan. Disamping itu seseorang dikatakan sebagai dewasa awal,

sudah harus mendapatkan pekerjaan penuh waktu yang kurang lebih tetap. Sedangkan ciri dewasa madya yaitu adanya kemajuan karir setidaknya pada usia 40 hingga 45 tahun dan individu dipromosikan lebih dahulu naik jabatan lebih jauh.

Guru honorer yang tergabung dalam Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) kota Bandung, berusia antara 21 hingga 52 tahun atau berada pada tahap perkembangan dewasa awal dan dewasa madya. Pada tahap perkembangan dewasa awal dan dewasa madya individu dicirikan oleh kegiatannya di bidang pekerjaan. Berdasarkan fenomena di AGHI, guru-guru honorer yang tergabung di dalamnya rata-rata telah menghabiskan waktu sebagai guru antara 1 tahun- 30 tahun. Kesemuanya belum berstatus sebagai CPNS, padahal para guru honorer ini sangat berharap dirinya diangkat sebagai PNS.

Kondisi ketidakpastian untuk diangkat sebagai guru PNS ini dilihat berdasarkan faktor waktu yaitu sudah lama menjadi guru honorer namun tidak kunjung diangkat-angkat, tidak jarang menimbulkan keresahan tersendiri. Keresahan yang terakumulasi akan berdampak pada munculnya keragu-raguan tentang keberlanjutan bidang pekerjaan sebagai guru, akan terus atau alih ke bidang pekerjaan lain. Pertanyaan yang bernuansa keragu-raguan ini, pada akhirnya, akan menentukan seberapa jelas orientasi masa depan bidang pekerjaan sebagai guru.

Orientasi masa depan didefinisikan sebagai cara seseorang memandang masa depannya, yang di dalamnya mencakup tiga tahap yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi yang ketiganya berdinamika membentuk siklus (Nurmi, 1989). Motivasi merujuk pada motif, minat atau ketertarikan dan tujuan orientasi pekerjaan di masa depan; perencanaan merujuk pada bagaimana rencana yang dimiliki individu untuk merealisasikan maksud, minat, dan tujuan yang dimiliki untuk pekerjaannya; evaluasi merujuk pada kemungkinan terealisasinya tujuan yang telah dibentuk dan rencana-rencana yang telah disusun dalam pekerjaannya.

Apabila ketiga siklus orientasi masa depan itu diterapkan pada guru honorer, maka akan dijumpai ilustrasi berikut ini. Pada awalnya, para guru honorer ini termotivasi untuk berprofesi sebagai guru (sekalipun harus melewati status sebagai guru honorer terlebih dahulu) karena ditunjang oleh pelbagai hal, misalnya kompetensi dan dukungan keluarga. Motivasi yang kuat itu, mendorongnya untuk menyusun langkah-langkah perencanaan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai guru. Mulai dari menyusun operasionalisasi kurikulum ke dalam kegiatan pengajaran sehari-hari, merancang metode pengajaran yang tepat, merancang metode evaluasi pengajaran, dan secara bertahap merancang pengembangan diri terkait dengan kompetensi agar selalu mengikuti kondisi kemajuan di bidang pendidikan. Setiap langkah-langkah perencanaan itu akan diakhiri dengan evaluasi tentang keakuratan perencanaan yang telah disusun. Evaluasi akan menghasilkan suatu penilaian tentang tepat

atau tidaknya perencanaan yang telah disusun itu. Apabila hasil evaluasi mengarah ke kecenderungan kurang memuaskan, maka akan menjadi masukan bagi kuat atau lemahnya motivasi guru honorer bersangkutan dalam menjalani pekerjaannya. Motivasi yang mengalami penurunan kekuatan itu akan mendorong guru honorer melakukan langkah-langkah perencanaan berikutnya yang pada akhirnya akan berujung pada evaluasi kembali. Tahap-tahap orientasi masa depan yang berbentuk siklus ini akan berlangsung terus. Harapan yang tidak kunjung terpenuhi, khususnya terkait dengan pengangkatan status sebagai guru PNS, lama kelamaan akan membuahkan kekecewaan yang berakumulasi. Kekecewaan, ketidakpastian, dan rasa was-was yang tidak berujung akan semakin melemahkan motivasi guru honorer terhadap pekerjaannya, hingga munculnya keraguan yang signifikan untuk meneruskan pilihan pekerjaan sebagai guru. Kekecewaan yang berakumulasi, pada akhirnya, akan menurunkan motivasi guru honorer dalam mengelola tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru kelas. Guru honorer yang kehilangan motivasi mengajar akan sulit diharapkan untuk memperlihatkan kinerja yang unggul. Guru honorer yang tidak menampilkan kinerja unggul akan menjalani tugas sehari-harinya dengan kualitas yang rendah. Tentu saja dampak akhirnya akan dirasakan oleh siswa yang kelasnya diajar oleh guru honorer bersangkutan. Paparan ini mencerminkan keadaan guru honorer yang orientasi masa depannya tidak jelas.

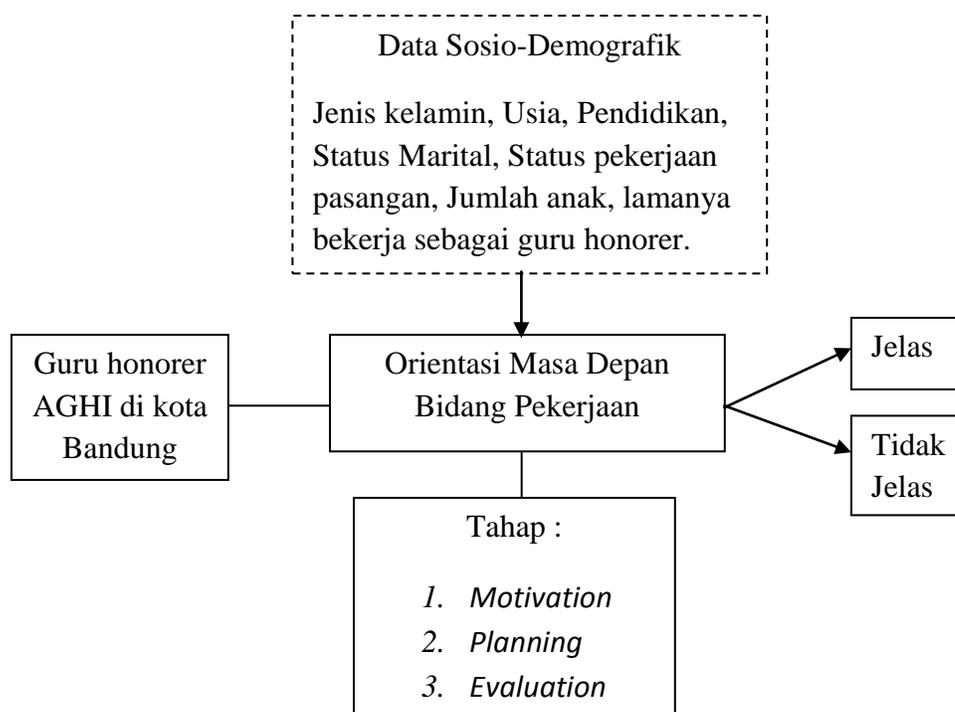
Guru honorer yang orientasi masa depannya jelas adalah guru yang memiliki motivasi kuat, perencanaan terarah dan evaluasi akurat. Bila salah satu dari fase tersebut rendah atau lemah, maka orientasi masa depan sebagai guru menjadi tidak jelas. Sebagai kelengkapan data tentang orientasi masa depan bidang pekerjaan pada guru honorer ini, peneliti tidak menggunakan faktor memengaruhi berdasarkan teori Nurmi karena tidak semua faktor memengaruhi yang relevan dengan sample. Peneliti akan menggunakan data sosio-demografik yang relevan dengan guru honorer. Data tersebut meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan pasangan, jumlah tanggungan (anak), pendidikan, lamanya bekerja sebagai guru honorer.

Usia memiliki pengaruh yang besar dalam orientasi masa depan guru honorer. Pada usia 27-44 tahun secara normatif dari norma budaya serta harapan masyarakat umumnya sudah memperoleh pekerjaan yang mapan sedangkan guru honorer belum memperoleh pekerjaan yang mapan. Terlebih lagi apabila guru honorer sudah menikah dan memiliki tanggungan anak. Harapan dari keluarga dan kebutuhan dalam mencukupi kebutuhan keluarga tentunya membuat pekerjaan yang mapan menjadi tuntutan yang lebih besar pada status pekerjaan sebagai guru. Ini berdampak pada kepuasan dari guru honorer terhadap pekerjaannya serta memengaruhi guru honorer untuk menetapkan minat dan tujuannya selanjutnya dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dengan ketidakjelasan masa depannya. Disamping usia terdapat sosio-demografik jenis

kelamin. Menurut penelitian Nurmi laki-laki lebih dituntut aktif baik dalam dunia pendidikan maupun nantinya menghadapi dunia pekerjaan dan perkawinan sedangkan perempuan lebih berperan dalam keluarga dan aktivitas rumah tangga (Nurmi, 1989).

Data sosio-demografik itu selanjutnya akan ditabulasikan dengan data utama. Melalui langkah di atas diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif tentang guru honorer dan orientasi masa depannya.

Secara skematis, kerangka pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.5.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Asumsi

- 1) Status sebagai guru honorer yang tidak kunjung diangkat sebagai CPNS atau PNS berdampak pada ketidakjelasan orientasi masa depan guru honorer.
- 2) Ketidakjelasan orientasi masa depan ini akan melemahkan motivasi, ketidakterarahan perencanaan, dan ketidakakuratan evaluasi para guru honorer dalam menjalankan profesi sebagai guru.